

dalam Penguatan kedudukan, Penguatan Wewenang, dan Penguatan dalam Aturan.

4.2. Saran

1. Memperkuat Komnas HAM dari segi bentuk dan kedudukan yaitu dari segi independensi. Agenda penguatan dilakukan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dari sistem fit and proper test menjadi sistem penunjukan partisipatif dan berimbang.
2. Memperkuat Wewenang Komnas HAM yaitu memberikan wewenang 1). Membentuk Tim Penilai Tolak Ukur Kepatuhan Rekomendasi, 2). Membuat rekomendasi yang mengadopsi pada rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman, 3). Diberikannya wewenang Pemanggilan Paksa (Subpoena), 4). Memberikan kewenangan Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada Komnas HAM.
3. Memperkuat Aturan dari Komnas HAM yaitu dengan cara membuat Peraturan Perundang Undangan yaitu Undang-Undang sendiri yang mengatur Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

Anwar, Rosihan, *Sejarah Kecil "Petite Historie" Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2004-2009

Arifin, Firmansyah dkk, *Lembaga negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*, 2005, Jakarta

Asplund, Knut D dkk (Ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008

Assidiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.

Atmadja, I Dewa Gede, *Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2012

Attamimi, A.HAMid S., *Hukum tentang peraturan tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1993

Colea, Wade M. and Francisco O. Ramirez, *Conditional Decoupling: Assessing the Impact of National Human Rights Institutions, 1981 to 2004*, American Sociological Review 78(4), 2011

Doludjawa, Linus, *Buku Pegangan Perancangan Peraturan Peundang-undangan*, Direktorat peraturan perundang-undangan, Jakarta 2005

- Estiko, Didit Hariadi dan Suhartono, *Lembaga negara Baru Pengawal Konstitusi*, Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, 2003
- Friedman, Lawrence M., *American Law*, W.W. Norton & Co., New York, 1984
- Ishak, Otto Syamsuddin, *Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional*, Komnas HAM, Jakarta, 2016
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1961
- Kementrian Perancangan Pembangunan Nasional, *Materi acuan Penyusunan daerah tentang wilayah pesisir terpadu*, Jakarta, 2005
- Kjærum, Morten, *National Human Rights Institutions Implementing Human Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Denmark, 2003
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM dalam Pembentukan UndangUndang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, Jakarta, 2016
- Meny, Yves and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, 3rd Edition Oxford University Press, 1998
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, *KOMNAS HAM: Sub-sistem dalam Sistem Perlindungan HAM*, Jakarta, Oktober, 2004
- Projodiko, Wirjono, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, 1971
- SAHRDC, *KOMNAS HAM dan Prinsip-prinsip Paris: Sebuah Gugatan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2001

- Setiawan, Ken, *The Paradox of Komnas HAM, the Indonesian National Human Rights Commission*, *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 17, 2016
- Smith, Jessica M. Ramsden, *Komnas HAM and the Politics of Human Rights in Indonesia*, Australian National University Thesis, Australia, 2000
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedua, CV. Rajawali, Jakarta, 1986
- Soeprapto, Enny, *Meninjau Ulang UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, 2011
- Soerdjono, Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakaan Keenam, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Yuliandri, *asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*, Departemen Hukum dan HAM direktorat jendral perundang-undangan, Jakarta, 2005
- Zaini, Hasan, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985

B. Jurnal

- Alamsyah, Bunyamin dan Uu Nurul Huda, *Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi negara*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 1, 2013

- Blau, Judith and Alberto Moncada, *Human Rights: A Primer*, American Journal of Political Science 42, 1998
- Kasim, Ifdhal, *Komnas HAM dan tantangannya dewasa ini*, Jurnal HAM Dignitas, Elsam, 2011.
- Lay, Conelis, *State Auxiliary*, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 12 Tahun 2006
- Mochtar, Zainal Arifin, *Efektifitas penyeleksian pejabat Negara di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, 2009
- Nurtjahjo, Hendra, *Lembaga, Badan, dan Komisi Independen di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan No 3, Tahun 2015
- Patra, Rommy, *Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 41, No 2, 2012
- Seidman, Ann and Robert Seidman, *Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters*, Kluwer Law International, London, 2001
- Soleman, Mochtar dan Mohammad Noer, *Nawacita sebagai strategi khusus Jokowi periode Oktober 2014- 20 oktober 2015*, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol. 13 No. 1, 2017
- Triningsih, Anna dan Nuzul Qur'aini Mardiya, *Interpretasi Lembaga negara dan Sengketa Lembaga negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga negara*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, 2017
- Wiratraman, Herlambang P., *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*, Jurnal Hukum Penta Rel Vol.1 No.1, 2007

Yigen, Kristine, “*Guarantees of Independence of National Human Rights Institutions: Appointment and Dismissal Procedures of Leading Members*”,
Articles and Working Papers, Danish Centre for Human Rights,
Copenhagen, 2001

C. Lain-lain

Laporan akuntabilitas Komnas HAM

Laporan Kerja Instansi Komnas HAM Tahun 2018

Laporan Tahunan Instansi Komnas HAM 2016

National Human Rights Institutions, *A Handbook on the Establishment and Strengthening of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights*, United Nations, 1995

National Human Rights Institutions, *Best Practice*, Commonwealth Secretariat,
2001

Publikasi Komnas Perempuan, *Laporan Investigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur tahun 1999-2000*

Rencana strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019

Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta, 2016

Vienna Declaration and Programme of Action, World Conference on Human Rights, 1993

D. Artikel

European Network of National Human Rights Institution, “National Human Rights Institutions (NHRIs) across the OSCE area”, <http://ennhri.org/our-work/nhri-academy/>

<http://birohukum.pu.go.id/component/content/article/101.html>,

<http://cepp.fisip.ui.ac.id/2015/10/13/state-auxiliary-organs-dibutuhkan-atau-dibubarkan/>,

<https://www.komnasHAM.go.id/index.php/news/2018/5/2/527/anggaran-komnas-HAM-semestinya-ditambah.html>

<https://www.komnasHAM.go.id/index.php/news/2019/3/8/753/perhatian-komnas-HAM-untuk-hak-penyandang-disabilitas-dalam-sesi-sidang-dewan-HAM-pbb-ke-40.html>,

<https://www.komnasHAM.go.id/index.php/news/2019/8/29/1119/komitmen-20-daerah-mewujudkan-kabupaten-kota-HAM.html>

<https://www.komnasHAM.go.id/index.php/news/2019/9/2/1128/komnas-HAM-ajukan-penambahan-anggaran-untuk-rencana-kerja-2020.html>,

<https://www.kontras.org/backup/home/index.php?module=berita&id=16>

United Nation, “International Human Rights Law”,

<https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/>